**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Pada UU No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan pajak daerah merupakan suatu bentuk peran masyarakat maka harus ada suatu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pada proses administrasi dan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah untuk kemakmuran rakyat semata.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksa-nakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah dengan fungsi meningkatkan objek atau subjek pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan potensi pendapatan daerah, meningkatkan peran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi derah serta meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pembayaran pajak retribusi daerah dan pendapatan daerah.

Namun dalam tahun 2016 penerimaan pajak Kota Bandung tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Berikut dibawah ini data PAD Kota Bandung tahun 2016

**Tabel 1.1**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator | Target Tahun 2016 (Rupiah) | Realisasi Tahun 2016 (Rupiah) | Capaian (%) |
| 1 | Jumlah Penerimaan pajak daerah : | 2.186.416.770.000 | 1.720.491.187.627 | 78,69% |
| 1. Pajak Hotel | 260.000.000.000 | 274.809.381.603 | 105,70% |
| 2. Pajak Restoran | 235.000.000.000 | 241.788.513.937 | 102,89% |
| 3. Pajak Hiburan | 68.000.000.000 | 69.831.106.484 | 102,69% |
| 4. Pajak Parkir | 26.000.000.000 | 29.289.132.387 | 112,65% |
| 5. Pajak BPHTB | 660.000.000.000 | 440.329.093.979 | 66,72% |
| 6. PPJ | 173.200.000.000 | 177.358.328.595 | 102,40% |
| 7. Pajak Reklame | 316.716.770.000 | 25.653.533.922 | 8,10% |
| 8. Pajak Air Tanah | 32.500.000.000 | 33.686.169.278 | 103,65% |
| 9. PBB | 415.000.000.000 | 427.745.927.442 | 103,07% |
| 2 | IKM bidang pelayanan pajak daerah. | 82 | 83,545 | 101,88% |
|  Rata-rata Capaian IKU | 90,29% |
|  Kinerja Capaian Sasaran | Tidak Tercapai |

Sumber : LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2016

Realisasi penerimaan pajak 2016 mencapai Rp. 1.720 triliun, namun jumlah itu belum memenuhi target sebelumnya yaitu Rp.2.186 triliun. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor seperti tidak tercapainya pajak reklame, pajak BPHTB dan juga dari sisi Sistem Informasi Akuntansi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

 Dalam hal ini kerap terjadi pemborosan waktu, yang tentunya menjadi masalah dan akan mengganggu sistem pelayanan pajak. Pemborosan waktu dapat dikatakan karena masih menggunakan sistem manual dalam perakuntansian dan administrasinya, atau memang boleh jadi sudah menggunakan sistem komputerisasi namun belum maksimal.

Padahal peranan sistem informasi akuntansi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Semakin cepat pengelolaan data yang akan disajikan perusahaan akan semakin cepat memberikan informasi tentang perusahaan. Maka dengan dukungan sistem informasi akuntansi di suatu perusahaan akan menambah berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Dalam konteks otonomi daerah, sistem informasi akuntansi pemerintah daerah mengacu pada PP 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah. Sistem ini berbasis pada jaringan komputer, yang mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), sehingga data di pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan baik. Berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 sistem informasi akuntansi merupakan sistem akuntansi yang berbasis *akrual* yang dapat menyediakan informasi yang konprehensif bagi pemangku kepentingan.

Penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerin-tahan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, terdapat salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh R.Fenny Syafariani & Evi Feryani (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah sebesar 82.3%. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen. R.Fenny Syafariani & Evi Feryani meneliti Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah, sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variable independen.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian R.Fenny Syafariani & Evi Feryani pada tahun 2014. Alasan memilih variable tersebut karena penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah banyak dilakukan, namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terutama mengenai bagaimana pengaruhnya dalam administrasi Pendapatan Pajak Daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah (Studi kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)”.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sedang berjalan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?

**1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

**1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah” pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

**1.3.2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terlah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sedang berjalan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung

**1.4.  Kegunaan Penelitian**

 Semua informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian dan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah maupun Pihak lain.

**1.4.1.** **Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan praktik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, terutama dalam sistem pencatatannya sehingga dapat menghasilkan laporan realisasi pendapatan yang akuntabel.
2. Bagi Bagian Keuangan dan Pajak

Sebagai bahan masukan untuk bagian keuangan dan bagian pajak dalam mengevaluasi suatu administrasi keuangan yang baik dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang akuntabel pada pendapatan pajak daerah.

**1.4.2.**  **Kegunaan Akademis**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah terutama mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah.

1. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam sektor publik.

1. Bagi Peneliti

Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pengaruhnya terhadap pendapatan pajak daerah sehingga diperoleh gambaran kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari.

**1.5.  Batasan Masalah**

Untuk mengkaji suatu permasalahan yang di hadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tersebut dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, agar pembahasan dan penyusunan dapat di lakukan secara terarah dan tercapai dengan tujuan yang di hadapkan serta untuk menghindari luasnya masalah. Maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Sistem Informasi Akuntansi Berfokus pada sistem akuntansi keuangan daerah di Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Penelitian terbatas pada Karyawan dibagian Keuangan dan Bidang pendapatan pajak.

**1.6.**  **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung sedangkan waktu penelitian dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.